



## Analisis Peran Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon

**Tarida Elisa Butarbutar<sup>1\*</sup>, & Yesita Windy Wuisan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Saudara, Kompleks Perum Bhayangkara dan Lembeh Permai, Wangurer, Kota Bitung, Indonesia 95515.

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Saudara, Kompleks Perum Bhayangkara dan Lembeh Permai, Wangurer, Kota Bitung, Indonesia 95515.

Email Korespondensi: [lisatari.lt@gmail.com](mailto:lisatari.lt@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun, penerapan sistem akuntansi tersebut tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang sangat menentukan dalam penerapan akuntansi sektor publik. Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta pelatihan yang pernah diikuti berpengaruh terhadap pemahaman aparatur dalam menjalankan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon telah berjalan, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta beban kerja yang cukup tinggi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerapan akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar penerapan akuntansi sektor publik dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** Sumber Daya Manusia; Akuntansi Sektor Publik; Pengelolaan Keuangan Daerah.

## ***The Role Of Human Resources In The Implementation Of Public Sector Accounting In The Tomohon City Regional Government***

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the role of human resources in the implementation of public sector accounting in the Regional Government of Tomohon City. Public sector accounting is essential in supporting transparency, accountability, and sound local financial governance. However, the effectiveness of its implementation largely depends on the quality of human resources responsible for managing the accounting process. This research employs a qualitative descriptive approach to provide an in-depth understanding of actual practices in the field. Data were collected through observation, interviews with local government officials directly involved in financial management and reporting, and review of relevant documentation. The findings indicate that human resources play a significant role in the implementation of public sector accounting. Educational background, work experience, and participation in training programs strongly influence officials' understanding and ability to apply public sector accounting standards and prepare financial reports properly. Although public sector accounting has been implemented in the Tomohon City Government, several challenges remain. These include limited technical competence, lack of continuous training, and relatively high workloads among financial management staff. Such conditions affect the optimal application of public sector accounting practices. Therefore, continuous improvement of human resource capacity through education and training is necessary to enhance the effectiveness of public sector accounting implementation and improve the overall quality of local government financial management.*

**Keywords:** Human Resources; Public Sector Accounting; Regional Financial Management.

**How to Cite:** Butarbutar, T. E., & Wuisan, Y. W. (2025). Analisis Peran Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon. *Empiricism Journal*, 6(4), 2259-2270. <https://doi.org/10.36312/ctxhqa59>



<https://doi.org/10.36312/ctxhqa59>

Copyright© 2025, Butarbutar & Wuisan  
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam sistem pemerintahan yang baik. Keuangan daerah berhubungan langsung dengan penggunaan dana publik yang bersumber dari masyarakat, yang berarti pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Masyarakat sebagai pemberi kontribusi melalui pajak dan retribusi berhak mengetahui bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mampu mengelola keuangan dengan baik tetapi juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang menuntut adanya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam era pemerintahan modern ini, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya menginginkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan, tetapi juga menginginkan adanya keterbukaan informasi terkait bagaimana anggaran daerah direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi ini bukan hanya menjadi hak masyarakat, tetapi juga merupakan keharusan bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, sistematis, dan berbasis pada standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang tepat akan membantu dalam memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai aliran dana, dari perencanaan hingga laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagai alat untuk mencatat seluruh transaksi keuangan pemerintah, akuntansi sektor publik menyajikan informasi yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan akuntansi sektor publik, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, diharapkan setiap penggunaan anggaran dapat dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (Rahman et al., 2025). Dalam hal ini, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa keuangan publik dikelola dengan efektif dan efisien.

Selain memberikan transparansi, akuntansi sektor publik juga berperan penting dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun dengan baik memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk mengetahui program mana yang berjalan efektif dan efisien, serta mengidentifikasi penggunaan anggaran yang perlu diperbaiki. Tanpa sistem akuntansi yang baik, pengelolaan keuangan daerah berisiko menjadi tidak terarah, sulit dikendalikan, dan rawan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik yang baik menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa keuangan daerah dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Namun, penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya melibatkan sistem dan aturan yang ada, tetapi juga bergantung pada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem tersebut. Akuntansi sektor publik, meskipun berbasis pada sistem dan regulasi yang baku, pada akhirnya dioperasikan oleh aparatur yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan kapasitas untuk menerapkan sistem tersebut dengan baik. Akob & Jamali (2024) menjelaskan bahwa sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, meskipun sistem dan regulasi yang diterapkan sudah sesuai, penerapan akuntansi sektor publik tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah memiliki latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi. Tidak semua aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Banyak aparatur yang berasal dari latar belakang administrasi, hukum, dan bidang lainnya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi sektor publik. Hal ini tentu memengaruhi tingkat pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menerapkan akuntansi sektor publik dengan optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memiliki kompetensi yang memadai untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Selain latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan juga sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Aparatur yang memiliki pengalaman kerja yang luas dan telah mengikuti berbagai pelatihan teknis biasanya lebih siap untuk menghadapi perubahan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang terus berkembang. Sebaliknya, aparatur yang tidak memperoleh pelatihan yang memadai atau jarang mengikuti pelatihan akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Perkembangan teknologi informasi juga turut membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Saat ini, banyak proses akuntansi sektor publik yang telah menggunakan sistem berbasis komputer. Sistem ini mempermudah pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan daerah dengan lebih efisien. Namun, penggunaan sistem berbasis teknologi ini juga menuntut aparatur untuk memiliki keterampilan dalam mengoperasikan perangkat lunak tersebut. Apabila sumber daya manusia tidak siap dalam hal keterampilan teknologi, maka penerapan sistem ini justru dapat menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan yang tidak hanya mencakup aspek teknis akuntansi tetapi juga keterampilan dalam menggunakan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kota Tomohon, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk memperbaiki sistem keuangan dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Namun demikian, upaya tersebut tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Meskipun berbagai kebijakan telah diambil, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi sektor publik di Kota Tomohon. Salah satu tantangan utama adalah beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Selain itu, tuntutan untuk selalu menyesuaikan diri dengan perubahan aturan dan sistem keuangan juga menjadi hal yang sering ditemui.

Peran sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terbatas pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga sangat penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu akan sangat membantu pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sebaliknya, laporan keuangan yang tidak disusun dengan baik dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan dan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Wahtan & Sumarni, 2025). Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi sangat penting agar penerapan akuntansi sektor publik dapat berjalan dengan efektif dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini berfokus pada pemahaman, kompetensi, dan tantangan yang dihadapi oleh aparatur dalam menjalankan akuntansi sektor publik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik, serta memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektivitas penerapan akuntansi sektor publik, khususnya di Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara nyata dan mendalam kondisi yang terjadi di lapangan, terutama terkait dengan peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau melakukan perhitungan statistik, melainkan untuk memahami proses, peran, serta tantangan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah dalam praktik pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi sektor publik. Murniarti (2025) menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif cocok digunakan untuk menggali pengalaman dan kondisi yang ada di lapangan, serta memahami secara mendalam fenomena yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon, serta sejauh mana pemahaman, kemampuan, dan pengalaman aparatur dalam menjalankan proses-proses akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur atau menjelaskan fenomena secara statistik, tetapi lebih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana akuntansi sektor publik diimplementasikan dalam konteks praktis, serta tantangan yang dihadapi oleh aparatur yang terlibat.

## Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, khususnya pada unit kerja yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Aparatur yang dipilih sebagai subjek penelitian memiliki peran sentral dalam proses pelaksanaan akuntansi sektor publik, mulai dari pencatatan transaksi, pengolahan data keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan yang disajikan kepada publik. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemahaman dan kompetensi aparatur dalam menerapkan akuntansi sektor publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kota Tomohon dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai kebijakan dan program. Meskipun ada kemajuan yang telah dicapai, dalam praktiknya, penerapan akuntansi sektor publik di Kota Tomohon masih sangat bergantung pada kesiapan dan peran serta sumber daya manusia yang menjalankannya. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada relevansi dan keunikan konteks daerah yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi sektor publik.

## Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni hingga Desember 2025. Rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan cukup untuk menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi sektor publik. Selama periode tersebut, data dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang lebih kaya dan beragam serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung dengan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai peran, pemahaman, pengalaman, serta kendala yang dihadapi oleh aparatur dalam penerapan akuntansi sektor publik. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang fleksibel, namun tetap memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang lebih terbuka dan mendalam. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi tentang pengalaman pribadi aparatur dalam mengelola keuangan daerah, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

### **2. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan dan pencatatan keuangan daerah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan akuntansi sektor publik di lapangan. Peneliti mengamati prosedur yang diterapkan dalam pencatatan transaksi keuangan, serta melihat bagaimana aparatur berinteraksi dengan sistem dan regulasi yang ada. Melalui observasi ini, peneliti dapat menilai apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang mungkin tidak terlihat melalui wawancara.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen pendukung, seperti laporan keuangan daerah, pedoman kerja, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data sekunder yang dapat digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen-dokumen ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan, serta apakah ada kesenjangan antara prosedur yang ditetapkan dengan praktik yang dilakukan di lapangan.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Pengumpulan Data dari Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi:** Tahap pertama dalam prosedur ini adalah mengumpulkan data dari wawancara dengan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai level aparatur untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akuntansi sektor publik. Observasi dilakukan secara langsung di tempat kerja aparatur untuk mengamati proses pengelolaan keuangan yang sedang berlangsung. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk mendalami prosedur dan kebijakan yang diterapkan.
- Pengolahan dan Analisis Data:** Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola tertentu, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan akuntansi sektor publik.

### **Teknik Analisis Data**

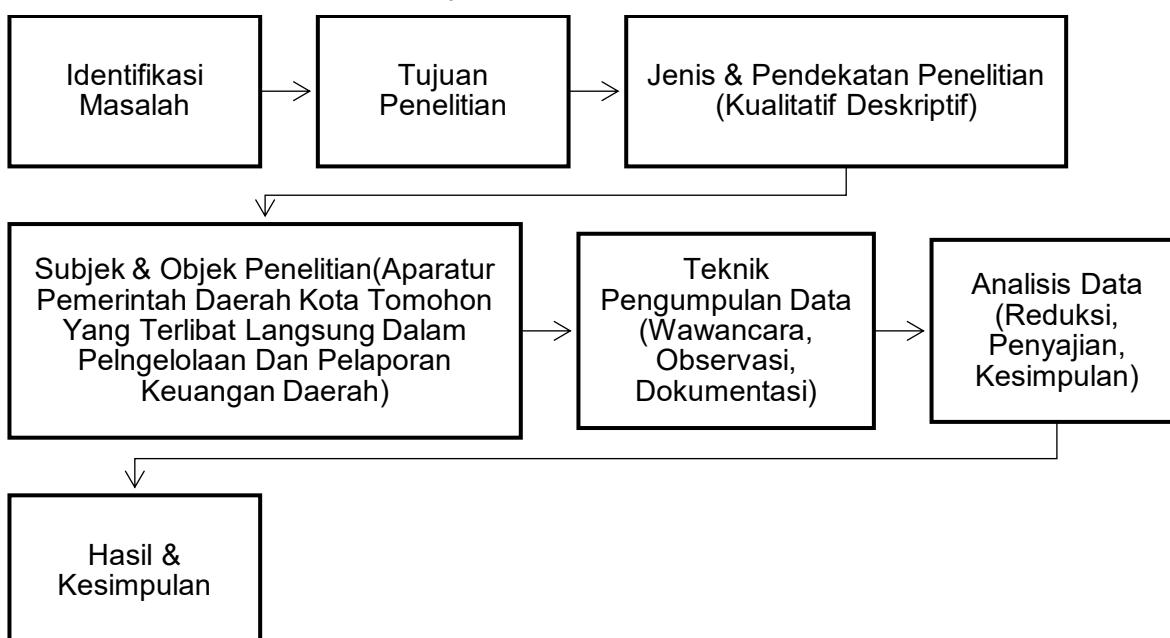
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

- Reduksi Data:** Tahap pertama adalah reduksi data, yang melibatkan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang relevan dengan peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan menyaring data yang akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti.
- Penyajian Data:** Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah dipilih dan disederhanakan kemudian disusun dalam bentuk narasi yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk cerita yang menggambarkan kondisi di lapangan, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. **Penarikan Kesimpulan:** Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencakup pemahaman mengenai peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik, serta tantangan dan kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah. Kesimpulan juga akan mencakup rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

### Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk memastikan validitas dan kredibilitas data yang dikumpulkan, serta untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam proses pengumpulan data. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Berikut merupakan desain dalam penelitian ini:



**Gambar 1.** Alur Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kota Tomohon memiliki perangkat organisasi daerah (OPD) yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan akuntansi sektor publik, peran sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan, terutama aparatur yang bertugas di bidang keuangan, akuntansi, dan perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga data yang diperoleh memberikan gambaran nyata mengenai kondisi SDM, pola kerja, serta praktik akuntansi sektor publik yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan beberapa informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon sudah mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Namun, kualitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh kompetensi, pemahaman, dan peran aktif sumber daya manusia yang menjalankannya. Temuan ini menyoroti bahwa meskipun sistem dan prosedur akuntansi sektor publik sudah sesuai dengan ketentuan yang

ada, kualitas implementasi akuntansi sangat bergantung pada kemampuan aparatur yang mengoperasikannya.

### Hasil Observasi

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan peneliti pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon, dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi keuangan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan ketentuan serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Aplikasi ini digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan dilakukan secara periodik dan mengikuti siklus anggaran pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Setiap transaksi keuangan dicatat berdasarkan aturan yang berlaku dan dilaporkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi sistem dan prosedur, penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon sudah memiliki dasar yang cukup kuat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan peran sumber daya manusia. Salah satu temuan utama adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap konsep dan praktik akuntansi sektor publik. Sebagian aparatur keuangan sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai akuntansi pemerintahan, termasuk prinsip-prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan. Akan tetapi, masih ada aparatur yang menjalankan tugasnya hanya sebatas mengikuti prosedur administratif tanpa memahami makna dan tujuan dari penerapan akuntansi sektor publik secara menyeluruh.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan pada masing-masing OPD sebenarnya sudah cukup jelas. Peran bendahara, pejabat pengelola keuangan (PPK), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) telah ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Namun, meskipun pembagian tugas sudah jelas, beban kerja yang cukup tinggi dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia di beberapa OPD menjadi kendala tersendiri. Kondisi ini sering menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara terburu-buru, terutama menjelang batas waktu pelaporan. Akibatnya, aparatur keuangan lebih fokus pada penyelesaian laporan tepat waktu daripada memastikan kualitas laporan yang sesuai dengan substansi akuntansi sektor publik.

Situasi ini menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan penerapan akuntansi sektor publik, tidak hanya dari sisi sistem, tetapi juga dari sisi kualitas dan kesiapan aparatur yang menjalankannya.

### Hasil Wawancara

Wawancara pertama dilakukan dengan salah satu pejabat pengelola keuangan daerah di Pemerintah Kota Tomohon, yaitu J. Mogi. Dalam wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa secara umum penerapan akuntansi sektor publik di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sudah mengacu pada standar yang berlaku, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setiap proses pencatatan dan pelaporan keuangan telah diarahkan untuk mengikuti ketentuan tersebut. Namun, informan menegaskan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh sistem atau regulasi yang digunakan, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Menurut informan, masih terdapat keterbatasan dari sisi latar belakang pendidikan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak semua aparatur memiliki pendidikan formal di bidang akuntansi atau keuangan. Sebagian besar aparatur berasal dari

latar belakang pendidikan umum dan non-akuntansi, sehingga pemahaman mereka terhadap akuntansi pemerintahan diperoleh melalui pengalaman kerja sehari-hari dan pelatihan yang diikuti. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan kemampuan di antara aparatur dalam memahami laporan keuangan, menerapkan aturan akuntansi, serta menyesuaikan diri dengan regulasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan kedua, yaitu S. Mongdong. Informan menjelaskan bahwa proses pelaporan keuangan daerah membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi serta pemahaman yang baik terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Menurutnya, kesalahan kecil dalam pencatatan transaksi, baik yang bersifat administratif maupun teknis, dapat berdampak pada hasil laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, aparatur yang menangani keuangan daerah dituntut untuk bekerja dengan cermat dan memahami setiap tahapan dalam proses akuntansi sektor publik.

Informan juga menambahkan bahwa peran sumber daya manusia tidak hanya terbatas pada melakukan pencatatan transaksi keuangan semata. Aparatur keuangan diharapkan mampu memahami substansi dari setiap transaksi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Namun dalam praktiknya, keterbatasan pelatihan yang bersifat berkelanjutan serta kurangnya pendampingan teknis menjadi kendala bagi sebagian aparatur. Akibatnya, masih ada aparatur yang merasa kesulitan dalam menerapkan akuntansi sektor publik secara optimal, terutama ketika menghadapi masalah yang bersifat teknis dan kompleks.

Wawancara dengan informan ketiga, yaitu P. Taula, semakin memperkuat temuan-temuan tersebut. Informan menyatakan bahwa perubahan regulasi akuntansi pemerintahan yang cukup sering mengharuskan aparatur untuk terus menyesuaikan diri dan memperbarui pengetahuan mereka. Aparatur yang tidak aktif mengikuti pelatihan, sosialisasi, atau pembaruan informasi terkait kebijakan akuntansi cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan baru. Hal ini berdampak pada keterlambatan adaptasi serta potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa kebijakan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah turut mempengaruhi kualitas penerapan akuntansi sektor publik. Aparatur yang baru ditempatkan di bidang keuangan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Pada tahap awal, aparatur tersebut masih sangat bergantung pada rekan kerja yang lebih berpengalaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan transfer pengetahuan antar-aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

**Tabel 1.** Temuan Utama Berdasarkan Hasil Observasi dan Wawancara

Aspek yang Ditemui	Temuan	Pengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik	
Kualitas Pemahaman Aparatur	Pemahaman aparatur terhadap akuntansi sektor publik bervariasi; sebagian besar hanya mengikuti prosedur administratif.	Perbedaan menyebabkan akuntansi yang kurang optimal dan berisiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.	pemahaman implementasi
Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan	Aplikasi keuangan terintegrasi dengan regulasi yang berlaku. Penggunaan sudah sesuai dengan standar pemerintah pusat.	Sistem yang digunakan sudah tepat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya.	implementasi
Proses Pencatatan dan	Pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan siklus	Proses pencatatan dan pelaporan terstruktur, namun terkadang	kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

<b>Aspek yang Ditemui</b>	<b>Temuan</b>	<b>Pengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>
Pelaporan	anggaran dan aturan yang berlaku. Proses pencatatan dilakukan secara periodik.	dilakukan terburu-buru menjelang batas waktu, mengurangi kualitas laporan.
Beban Kerja Aparatur	Beban kerja yang tinggi di beberapa OPD menyebabkan pelaporan terburu-buru dan terkadang kurang teliti.	Beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan.
Pengalaman Kerja Aparatur	Aparatur berpengalaman lebih memahami prosedur dan alur kerja akuntansi sektor publik, sementara yang baru membutuhkan waktu adaptasi.	Pengalaman kerja mempercepat adaptasi terhadap sistem dan aturan baru, sedangkan aparatur baru membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi.
Rotasi Jabatan	Aparatur yang baru ditempatkan di bidang keuangan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru.	Adaptasi yang lambat dapat mengganggu proses akuntansi dan memperlambat pelaporan keuangan, sehingga berdampak pada kualitas laporan.
Koordinasi Antar Aparatur	Koordinasi antar aparatur dalam pengelolaan keuangan sudah cukup baik, namun masih ada kendala komunikasi di beberapa OPD.	Koordinasi yang buruk dapat menghambat kelancaran pencatatan dan pelaporan, mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.
Pelatihan dan Pengembangan	Keterbatasan pelatihan berkelanjutan menghambat kemampuan aparatur dalam menghadapi perubahan regulasi dan aplikasi baru.	Pelatihan yang terbatas mengurangi kemampuan aparatur dalam menyesuaikan diri dengan perubahan aturan, yang berdampak pada implementasi akuntansi.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon sangat dipengaruhi oleh peran sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Walaupun pemerintah daerah telah memiliki berbagai aturan, sistem, dan pedoman teknis terkait pengelolaan keuangan daerah, keberhasilan penerapannya tetap sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankan proses tersebut setiap hari. Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik di Kota Tomohon sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan daerah. Aparatur pengelola keuangan di setiap OPD telah menjalankan tugas pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman aparatur terhadap akuntansi sektor publik masih beragam. Ada aparatur yang benar-benar memahami konsep dan tujuan akuntansi sektor publik, tetapi ada juga yang menjalankan tugasnya hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi.

Perbedaan pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan sumber daya manusia. Aparatur yang memiliki pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan daerah cenderung lebih mudah memahami alur pencatatan, proses penyusunan laporan, serta makna informasi keuangan yang dihasilkan (Yusuf & Buku, 2025). Mereka mampu melihat laporan keuangan bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan dan membantu pengambilan keputusan. Sebaliknya, aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sering kali mengalami

kesulitan dalam memahami istilah dan konsep akuntansi sektor publik, sehingga lebih banyak bergantung pada contoh laporan atau arahan dari rekan kerja.

Selain pendidikan, kompetensi teknis juga menjadi faktor penting dalam peran sumber daya manusia (Musafah & Nurfuadi, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur sangat berkaitan dengan pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti. Aparatur yang sering mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah cenderung lebih siap menghadapi perubahan regulasi. Mereka juga lebih percaya diri dalam menjalankan tugas, terutama saat terjadi pembaruan aturan atau penggunaan aplikasi keuangan yang baru. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua aparatur memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Keterbatasan anggaran dan waktu sering menjadi kendala, sehingga pengembangan kompetensi belum dilakukan secara merata. Akibatnya, terdapat kesenjangan kemampuan antaraparatur, yang berdampak pada kualitas penerapan akuntansi sektor publik di masing-masing OPD (Choiri, 2025 ; Wahtan & Sumarni, 2025).

Pengalaman kerja juga menjadi faktor yang memperkuat peran sumber daya manusia. Aparatur yang telah lama bekerja di bidang keuangan daerah umumnya lebih memahami proses dan alur kerja, termasuk cara menyelesaikan permasalahan yang sering muncul dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Mereka juga lebih mampu mengantisipasi kesalahan dan memahami pentingnya ketepatan serta ketelitian dalam menyusun laporan keuangan. Sementara itu, aparatur yang baru ditempatkan di bidang keuangan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan belajar, sehingga peran mereka belum sepenuhnya optimal (Atbar & Sos, 2025). Penelitian ini juga mengungkap bahwa beban kerja turut memengaruhi peran sumber daya manusia dalam penerapan akuntansi sektor publik. Di beberapa OPD, jumlah aparatur keuangan tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Kondisi ini membuat aparatur bekerja dalam tekanan waktu, terutama menjelang batas waktu pelaporan. Akibatnya, fokus utama sering kali adalah menyelesaikan laporan tepat waktu, bukan memastikan kualitas informasi keuangan yang disajikan.

Selain aspek teknis, sikap dan tanggung jawab aparatur juga menjadi bagian penting dari peran sumber daya manusia. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya cenderung lebih teliti, disiplin, dan berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Mereka berusaha memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan sesuai aturan. Sebaliknya, kurangnya motivasi dan rasa tanggung jawab dapat menyebabkan pekerjaan dilakukan secara asal-asalan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi dan kerja sama antaraparatur berpengaruh terhadap penerapan akuntansi sektor publik. Dalam pengelolaan keuangan daerah, proses pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan banyak pihak. Aparatur yang mampu bekerja sama dan saling berbagi informasi akan lebih mudah menyelesaikan tugas, dibandingkan dengan aparatur yang bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kota Tomohon tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi sangat ditentukan oleh peran sumber daya manusia. Pendidikan, kompetensi, pengalaman, beban kerja, serta sikap aparatur menjadi faktor-faktor yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas penerapan akuntansi sektor publik. Temuan ini juga menunjukkan adanya kebaruan penelitian, yaitu penekanan pada peran sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam penerapan akuntansi sektor publik, bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai penentu kualitas informasi keuangan daerah. Penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa perbaikan sistem tanpa diikuti pengembangan sumber daya manusia tidak akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Dengan demikian, peningkatan kualitas penerapan akuntansi sektor publik di Kota Tomohon perlu diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih pada pelatihan, pendampingan, serta penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, agar akuntansi sektor publik dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat penting dalam penerapan akuntansi sektor publik pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Meskipun sistem, aturan, dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah sudah tersedia, keberhasilan penerapannya tetap sangat bergantung pada aparatur yang menjalankannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik di Kota Tomohon pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kualitas penerapannya belum sepenuhnya merata di setiap perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, tingkat kompetensi, serta pengalaman kerja aparatur pengelola keuangan daerah. Aparatur yang memiliki pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan cenderung lebih memahami proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta mampu menginterpretasikan informasi keuangan dengan lebih baik. Sementara itu, aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih menghadapi kendala dalam memahami konsep dan istilah akuntansi sektor publik, sehingga penerapannya lebih bersifat administratif.

Selain pendidikan, kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman kerja juga berperan besar dalam mendukung penerapan akuntansi sektor publik. Aparatur yang sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman kerja yang cukup menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi serta penggunaan sistem keuangan daerah. Sebaliknya, keterbatasan pelatihan dan beban kerja yang tinggi menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas penerapan akuntansi sektor publik..

## REKOMENDASI

Pertama, Pemerintah Daerah Kota Tomohon disarankan untuk menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih terarah, khususnya bagi aparatur yang mengelola keuangan daerah. Kebijakan ini dapat berupa program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, seperti pelatihan rutin, workshop, serta bimbingan teknis terkait akuntansi sektor publik dan regulasi keuangan daerah yang terus mengalami perubahan. Kedua, diperlukan upaya penyesuaian penempatan sumber daya manusia berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Aparatur yang memiliki pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi sebaiknya ditempatkan pada posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah agar proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat. Ketiga, Pemerintah Daerah Kota Tomohon disarankan untuk meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan daerah.

Dukungan teknologi yang memadai akan membantu aparatur dalam menjalankan tugasnya, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Keempat, perlu adanya penguatan peran pengawasan dan pendampingan dari Inspektorat Daerah. Pengawasan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan akuntansi sektor publik. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, aparatur dapat lebih memahami kesalahan yang terjadi dan melakukannya perbaikan secara langsung. Kelima, bagi dunia akademik dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan akuntansi sektor publik, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, atau komitmen aparatur. Penelitian

lanjutan juga dapat dilakukan dengan pendekatan metodologi yang berbeda agar diperoleh sudut pandang yang lebih beragam.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Ketua STBM Dua Saudara Bitung yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Tomohon sebagai objek penelitian yang telah menerima penulis dalam menjalankan penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akob, M., & Jamali, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Organisasi. *Jambura Journal of Educational Management*, 160-172.
- Atbar, S., & Sos, S. (2025). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA: Teori, Konsep, dan Aplikasi dalam Sektor Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Choiri, M. (2025). Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari Jambi. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 10(03), 344-354.
- Demung, I. W., Judjanto, L., Amrih, M., & Abriani, A. (2025). *Pengantar Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lahum, E. F. N., Gunawan, C. I., & Putri, S. A. (2025). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi).
- Murniarti, E. (2025). Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan.
- Musafah, A., & Nurfuadi, N. (2025). Peran Pelatihan dan Pengembangan dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia. *PERISAI: Jurnal Pendidikan dan Riset Ilmu Sains*, 4(1), 72-81.
- Prastowo, Y., & Saputro, J. A. (2025). *Akuntansi Sektor Publik 5.0: Transformasi Digital Menuju Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel*. Penerbit Andi.
- Qisthy, N. A., Putri, V. S., Hairinisa, S., & Meidiyustiani, R. (2025). Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara. *Discoveries in Economics and Accounting Studies*, 1(1), 9-12.
- Rahman, R. S., Judjanto, L., Karubaba, C. J., & Nababan, D. M. (2025). *Akuntansi Sektor Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Theresiana, M., & Supriyadi, S. (2025). Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Samarinda. *MLJ Merdeka Law Journal*, 6(1).
- Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni, S. (2025). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 363-381.
- Yusuf, I., Jaya, A., & Buku, A. (2025). Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Kinerja Perbendaharaan di BPPKAD Kabupaten Intan Jaya. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(2).